

The "Ulos" Metaphor in Japanese Diplomacy: A Critical Discourse Analysis of the Japanese Consul General's Speech in Medan

Irwan^{a,*}

^a Universitas Sumatera Utara
Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Padang Bulan, Medan, Indonesia
Pos-el: irwan.msi@usu.ac.id

Abstract

This study analyzes the discursive strategies in the Japanese Consul General's speech in Medan during the Emperor of Japan's birthday reception. Using Norman Fairclough's three-dimensional Critical Discourse Analysis (CDA) framework, this research examines how language is employed to construct diplomatic identity and assert Japan's soft-power influence in North Sumatra. This study analyzes official speech manuscripts in Japanese and Indonesian at three levels: textual, discursive practice, and socio-cultural practice. The results show that weaving metaphors (tate-ito and yoko-ito), compared to the traditional Ulos cloth, become tools for ideological localization and naturalizing universal values such as democracy and the rule of law. The speech places empathy narratives about local flood disasters at the beginning, which acts as a discursive positioning strategy to build moral legitimacy (ethos). The study concludes that Japan obscure asymmetrical power relations by framing economic and political interests within a 'heart-to-heart' (kokoro no tomo) friendship narrative rooted in local audience wisdom.

Keywords: *Critical Discourse Analysis, Norman Fairclough, Japanese Diplomacy, Ulos Metaphor*

1. Pendahuluan

Saat ini, diplomasi modern tidak lagi hanya bergantung pada kekuatan militer atau ekonomi (*hard power*). Diplomasi bergeser ke arah kekuatan narasi dan simbolisme (*soft power*). Melalui lensa analisis wacana kritis, pidato diplomatik dipahami sebagai praktik diskursif yang erat dengan artikulasi kepentingan. Dalam kerangka ini, penggunaan metafora lokal seperti 'Ulos' menjadi ruang yang menarik untuk dibedah; apakah ia sekadar representasi keintiman kultural atau merupakan bagian dari strategi diskursif untuk memperkuat pengaruh diplomasi.

Kerja sama bilateral antara Jepang dan Indonesia dalam konteks regional, khususnya di Sumatera Utara, memiliki karakteristik unik yang berakar pada sejarah panjang dan hubungan ekonomi strategis. Pidato Furugori Toru, Konsul Jenderal Jepang di Medan, pada kesempatan Hari Ulang Tahun Kaisar Naruhito, sangat penting dan menarik untuk dipelajari. Medan memegang peran strategis sebagai gerbang ekonomi menuju Indonesia Barat dan sebagai pusat perwakilan diplomatik Jepang untuk enam provinsi di Sumatera.

Hal yang menarik dalam pidato ini adalah penggunaan metafora kain tenun tradisional di wilayah Sumatera Utara, yaitu 'ulos', sebagai simbol untuk menjelaskan hubungan bilateral. Strategi lokalisasi pesan ini menunjukkan upaya sadar untuk mengonstruksi identitas Jepang yang terkesan “dekat” dan “memahami” nilai kearifan lokal Sumatera Utara, sekaligus diduga merepresentasikan kepentingan diplomatik dan ekonomi Jepang dalam hubungan bilateral.

Penelitian ini menggunakan model tiga dimensi Fairclough (teks, praktik diskursif, dan praktik sosial), untuk membongkar ideologi di balik pilihan kata tersebut. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana praktik sosial-budaya lokal direpresentasikan dalam pidato diplomatik Jepang.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi retorika Konsul Jenderal Jepang di Medan dalam membangun relasi diplomatik yang persuasif melalui simbolisme budaya lokal.

2. Metode dan Teori

2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough. Pendekatan ini dipilih karena peneliti tidak hanya mendeskripsikan struktur kebahasaan dalam pidato, tetapi juga menginterpretasikan proses produksi teks dan menjelaskan kaitannya dengan konteks sosial-politik (diplomasi Jepang-Indonesia).

Sumber data pada penelitian ini berupa dokumen tertulis naskah pidato Konsul Jenderal Jepang di Medan, Furugori Toru, pada acara Resepsi Hari Ulang Tahun Kaisar Jepang yang dipublikasikan pada website resmi Konsulat Jenderal Jepang di Medan dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Data penelitian berupa fragmen teks (kata, frasa, kalimat, dan paragraf) yang mengandung metafora, pilihan diksi strategis, dan representasi identitas hubungan bilateral.

Data dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi dan simak-catat. Peneliti melakukan pembacaan secara mendalam (*close reading*) terhadap naskah pidato untuk mengidentifikasi elemen-elemen diskursif yang menonjol, khususnya penggunaan metafora "Tenun" dan "Ulos" sebagai inti narasi. Instrumen utama dalam penelitian ini

adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang dibantu dengan tabel kodifikasi data untuk mengklasifikasikan temuan berdasarkan tiga level analisis Fairclough.

2.2 Teori

Analisis dilakukan mengikuti skema tiga dimensi Fairclough (1995, 2001):

1. Analisis Tekstual (*Description*): Membedah aspek linguistik seperti kosakata, metafora, dan struktur kalimat.
2. Analisis Praktik Diskursif (*Interpretation*): Menganalisis bagaimana teks tersebut diproduksi (konteks protokol diplomatik) dan bagaimana teks tersebut mengonsumsi narasi-narasi lain (intertekstualitas).
3. Analisis Praktik Sosio-Kultural (*Explanation*): Menghubungkan temuan dengan realitas sosial, yaitu upaya Jepang dalam memperkuat soft power dan pengaruhnya di Sumatera Utara.

Penggunaan metafora dalam wacana politik dan diplomatik sering kali berfungsi sebagai alat naturalisasi ideologi. Menurut Fairclough (1989), metafora bukan sekadar ornamen gaya bahasa, melainkan cara tertentu dalam merepresentasikan realitas yang dapat memengaruhi kognisi audiens. Dengan membingkai kerja sama politik-ekonomi ke dalam metafora 'benang lusi dan pakan', komunikator berupaya menyederhanakan kompleksitas agenda diplomatik menjadi sesuatu yang akrab dan dapat diterima secara kultural oleh masyarakat lokal.

Dalam perspektif Fairclough (1992), wacana dipahami sebagai bentuk praktik sosial yang bersifat dialektis, di mana wacana membentuk dan dibentuk oleh situasi, institusi, dan struktur sosial. Dalam konteks ini, pidato diplomatik Konsul Jenderal Jepang tidak dipandang sebagai rangkaian kalimat netral, melainkan sebuah instrumen yang secara aktif mengonstruksi realitas hubungan bilateral antara Jepang dan masyarakat Sumatera Utara.

Untuk membedah dimensi praktik sosial-budaya (*socio-cultural practice*) dalam wacana diplomatik ini, analisis ini diperkuat oleh konsep *soft power* yang digagas oleh Joseph Nye (2004). Nye mendefinisikan *soft power* sebagai kemampuan suatu negara untuk memengaruhi pihak lain dan mendapatkan hasil yang diinginkan melalui daya tarik (*attraction*) budaya, nilai-nilai politik, serta kebijakan luar negeri, bukan melalui paksaan

militer (*coercion*) atau tekanan ekonomi (*payments*). Dalam ranah diplomasi budaya, bahasa dan pilihan metafora bukan sekadar alat komunikasi netral, melainkan instrumen diskursif untuk membangun daya pikat tersebut. Melalui lensa ini, penggunaan simbol kebudayaan lokal dalam pidato diplomatik dapat dipahami sebagai strategi *soft power* yang bertujuan untuk mengonstruksi kedekatan emosional, menyelaraskan nilai, dan pada akhirnya, memperkuat pengaruh serta legitimasi posisi politik negara donor di tingkat lokal tanpa memicu resistensi.

3. Kajian Pustaka

Secara umum, studi terdahulu yang menerapkan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tren fokus akademik. Sebagai contoh, Tahlia dan Abrian (2023) membedah narasi kritik dalam lirik musik, sementara Azmah et al. (2023) memanfaatkan kerangka kerja Fairclough untuk membedah narasi politik di media sosial menjelang pemilihan umum.

Di sisi lain, studi oleh Rohmadiati dkk. (2025) menunjukkan bahwa program *Nihongo Partners* merupakan bentuk intensifikasi diplomasi budaya Jepang di Indonesia pada interaksi akar rumput. Selaras dengan hal tersebut, temuan Anita Dewi dan Wedayanti (2025) membahas mengenai strategi negosiasi berbasis budaya Jepang. Dalam konteks sosiopragmatik, penggunaan simbol yang akrab bagi mitra bicara bukan sekadar hiasan bahasa, melainkan upaya strategis untuk membangun harmoni (*Wa*) yang menjadi landasan utama dalam interaksi profesional maupun diplomatik Jepang. Lebih lanjut, temuan Wedayanti dkk. (2026) menjelaskan bahwa masyarakat dan representasi Jepang saat ini semakin adaptif terhadap perbedaan budaya dan bahasa.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa model Fairclough telah luas digunakan untuk menganalisis wacana musik, media sosial, hingga diplomasi budaya secara makro. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji penggunaan metafora budaya lokal dalam pidato diplomatik Jepang di Indonesia masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut (*research gap*) dengan menawarkan perspektif baru yang menelaah strategi representasi budaya lokal dalam pidato Konsul Jenderal Jepang di Medan.

4. Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Kategorisasi Analisis Wacana Kritis pada Pidato Konsul Jenderal Jepang

Dimensi Fairclough	Fragmen Teks (Bahasa Jepang)	Strategi Wacana	Makna Diskursif & Ideologis
Tekstual (Micro)	<i>Toutoi inochi o ushinawareta katagata</i> (尊い命を失われた方々)	Diksi Kehormatan & Eufemisme	Membangun kredibilitas moral (<i>Ethos</i>) dengan memberikan penghormatan tertinggi pada korban bencana lokal.
	<i>Tate-ito</i> (縦糸) & <i>Yoko-ito</i> (横糸)	Metafora Konseptual (Tenun)	Menyederhanakan hubungan diplomatik yang kompleks menjadi narasi budaya yang kokoh namun indah.
Praktik Diskursif (Meso)	<i>Hondai ni hairu mae ni... aidou no i o hyoushimasu</i> (本題に入る前に...哀悼の意を表します)	Discursive Positioning (Empati)	Menempatkan kemanusiaan di atas agenda politik; strategi <i>ice-breaking</i> untuk mendapatkan simpati audiens sebelum negosiasi.
	<i>Kokoro no Tomo</i> (心の友) / Sahabat dari Hati ke Hati	Interdiskursivitas (Populer-Formal)	Mengaburkan batas antara formalitas diplomatik dengan kedekatan emosional budaya populer Indonesia.
	<i>JETRO / To-nichi Chokusetsu Tousei</i> (対日直接投資)	Intertekstualitas	Mengaitkan pidato lokal di Medan dengan kebijakan makro pemerintah pusat di Tokyo.
Sosio-Kultural (Macro)	<i>Uros</i> (ウロス) & <i>Traditional Dance</i>	Lokalisasi (Glocalization)	Praktik <i>Soft Power</i> Jepang untuk melakukan penetrasi pengaruh melalui pengakuan terhadap identitas lokal (Sumut).
	<i>Fuhen-teki na kachikan</i> (普遍的な価値観)	Naturalisasi Ideologi	Menegaskan posisi Jepang dalam blok demokrasi global sebagai standar nilai yang "universal" bagi mitra regional.

Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1, strategi empati yang diletakkan di awal pidato (sebelum masuk ke topik utama/*hondai*) berfungsi sebagai prelude diskursif. Hal ini menunjukkan bahwa Jepang tidak hanya hadir sebagai aktor ekonomi, tetapi juga sebagai mitra yang berbagi beban emosional dengan masyarakat Sumatera Utara. Strategi ini secara efektif menurunkan resistensi audiens terhadap agenda-agenda strategis (benang lusi dan pakan) yang dipaparkan setelahnya.

4.1 Analisis Tekstual (*Micro Level*)

4.1.1. Diksi Kehormatan dan Eufemisme

Pada bagian awal pidato, Konsul Jenderal secara khusus memberikan ruang bagi korban bencana alam di Sumatera Utara:

【豪雨洪水被害】

さて、本題に入る前に、昨年11月に発生いたしました豪雨及び洪水により、尊い命を失われた方々に謹んで哀悼の意を表します。

(*Sate, hondai ni hairu mae ni, sakunen juuichigatsu ni hassei itashimashita gouu oyobi kousui ni yori, toutoi inochi wo ushinawareta katagata ni tsutsushinde aidou no i wo hyoushimasu.*)

‘Pertama-tama, saya menyampaikan belasungkawa kepada para korban jiwa akibat hujan lebat dan banjir bandang yang terjadi pada November tahun lalu. Saya menyampaikan rasa duka cita yang tulus kepada keluarga yang ditinggalkan.’

Analisis Tekstual (*Micro Level*): Struktur dan Pilihan Kata

- Urutan Diskursif (*Sate, hondai ni hairu mae ni*): Penggunaan frasa "Sebelum masuk ke topik utama" menunjukkan prioritas moral. Konsul menunda agenda politik/ekonomi demi menunjukkan empati. Ini adalah teknik *discursive positioning* di mana pembicara memposisikan dirinya bukan sebagai “pejabat asing”, melainkan sebagai “tetangga yang menunjukkan kepeduliannya”.
- Diksi Kehormatan (*Toutoi Inochi*): Penggunaan kata toutoi (尊い - berharga/mulia) untuk menyebut nyawa korban banjir memberikan kesan penghormatan tertinggi, yang dalam budaya Jepang (yang tentunya juga dalam budaya Batak dan Melayu di Sumatera Utara) sangat krusial dalam membangun rasa hormat timbal balik.

4.1.2. Metafora Tenun

Pada bagian ini, peneliti membedah bagaimana Consul Jenderal Furugori Toru menggunakan analogi kain tradisional (Ulos) untuk membingkai hubungan diplomatik.

A. Benang Lusi (*Tate-ito*) sebagai Pondasi Nilai

Konsul Jenderal Furugori Toru menyebutkan:

「縦糸」は、両国が共有する普遍的な価値観。すなわち、自由、民主主義、法の支配、平和主義といった価値観です。

(*Tate-ito wa, ryōkoku ga kyōyuu suru fuhen-teki na kachikan. Sunawachi, jiyuu, minshushugi, hō no shihai, heiwashugi itta kachikan desu.*)

‘Saya mengibaratkan “benang lungsi” sebagai nilai-nilai universal yang kita berbagi seperti kebebasan, demokrasi, supremasi hukum, dan pasifisme.’

Analisis Tekstual (*Micro Level*): Struktur dan Pilihan Kata

- Pilihan Diksi: Penggunaan kata *tate-ito* (縦糸) secara teknis merujuk pada benang yang dipasang secara vertikal dan kaku pada alat tenun. Secara diskursif, ini melambangkan sesuatu yang permanen, tidak berubah, dan menjadi penopang.
- Naturalisasi Ideologi: Dengan menyandingkan “Ulos” (budaya lokal) dengan nilai-nilai Barat seperti “Demokrasi” dan “*Rule of Law*”, Jepang sedang melakukan naturalisasi ideologi. Seolah-olah menjadi demokratis adalah bagian alami dari “menenun” hubungan dengan masyarakat Sumatera Utara.

B. Benang Pakan (*Yoko-ito*) sebagai Implementasi Praktis

Konsul Jenderal melanjutkan:

「横糸」は、日本とインドネシアの関係を色鮮やかなものにする多岐にわたる具体的な協力です。

(*Yoko-ito wa, Nihon to Indonesia no kankei o irodori azayaka na mono ni suru taki ni wataru gutaiteki na kyōryoku desu.*)

‘Saya mengibaratkan “benang pakan” sebagai kerja sama konkret yang membuat hubungan kedua negara kita (Jepang dan Indonesia) dinamis di berbagai bidang.’

Analisis Tekstual (*Micro Level*): Struktur dan Pilihan Kata

- Metafora Warna: Penggunaan frasa *irodori azayaka* (色鮮やか - berwarna cerah/indah, yang dalam versi bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “dinamis”) memberikan konotasi positif terhadap proyek ekonomi dan bisnis.
- Relasi Kuasa: Dengan memasukkan aspek ekonomi (bisnis, infrastruktur, edukasi) sebagai *yoko-ito*, Jepang memposisikan dirinya sebagai pihak yang membawa “warna” atau kemajuan bagi pembangunan daerah di Sumatera Utara.

4.2 Analisis Praktik Diskursif (Meso Level): Intertekstualitas

4.2.1. *Discursive Positioning* (Empati)

Di awal pidato, Konsul Jenderal melakukan pendekatan dengan menyinggung peristiwa yang baru saja terjadi di wilayah yurisdiksi Konsulat Jenderal Jepang di Medan. Dengan menyebutkan waktu yang spesifik (November tahun 2025), Konsul Jenderal Furugori Toru menunjukkan bahwa ia memantau kondisi lokal secara aktual. Secara diskursif, ini menghilangkan kesan “menara gading” korps diplomatik.

Konsul Jenderal Furugori menutup bagian pembuka pidatonya dengan doa sebagai jembatan:

一日も早く、皆様が安心して笑顔で過ごせる穏やかな日々が戻るよう、心よりお祈り申し上げます。

(Ichinichi mo hayaku, Minasama ga anshin shite egao de sugoseru odayaka na hibi ga modoru you, kokoro yori oinori moushiagemasu.)

‘Saya berdoa sepenuh hati agar situasi segera membaik sehingga para korban yang terdampak dapat tenang dan tersenyum lagi.’

Narasi ini berfungsi sebagai mitigasi risiko. Dalam diplomasi, membicarakan perayaan (HUT Kaisar) di tengah duka masyarakat lokal berpotensi memunculkan anggapan tidak peka. Pernyataan ini berfungsi menyelaraskan frekuensi emosional antara Jepang dan masyarakat Sumatera Utara.

4.2.2. Interdiskursivitas (Populer-Formal)

Melalui pidatonya, Konsul Jenderal Furugori mengaburkan batas antara formalitas diplomatik dan kedekatan emosional budaya populer Indonesia. Secara implisit, hal ini merupakan bagian dari strategi kesantunan (*Politeness*).

Penggunaan istilah “*Kokoro no Tomo*” (心の友) yang berarti “Sahabat dari Hati ke Hati” adalah bentuk interdiskursivitas antara bahasa diplomatik yang formal dengan bahasa populer/emosional untuk menciptakan kedekatan psikologis.

4.2.3. Intertekstualitas

Pada fase berikutnya, Konsul Jenderal Furugori Toru menyampaikan narasi yang mengaitkan pidatonya yang disampaikan dalam skala lokal di Medan dengan kebijakan makro pemerintah pusat di Tokyo.

Penyebutan “Program Promosi Investasi Langsung 2025” dan “JETRO” menunjukkan bahwa pidato ini merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan ekonomi makro Jepang di Tokyo yang diturunkan ke level mikro di Medan.

4.3 Analisis Praktik Sosio-Kultural (Macro Level): *Soft Power & Glocalization*

4.3.1. Ulos sebagai Alat Diplomasi

Dalam pidatonya, mengapa Konsul Jenderal Jepang di Medan justru menggunakan istilah ulos? Mengapa bukan kimono? Di sini terlihat adanya praktik “*Glocalization*”. Beliau sadar bahwa untuk memenangkan hati audiens di Medan (terutama tokoh Forkopimda dan pejabat di lingkungan pemerintahan daerah Sumut), penting baginya menggunakan simbol identitas audiens tersebut.

4.3.2. Kepentingan Hegemoni

Secara sosiopolitik, “Benang Lusi” (Demokrasi & Hukum) sebenarnya adalah cara halus Jepang untuk mengajak Indonesia (dan Sumut sebagai wilayah strategis) tetap berada dalam koridor pengaruh blok Jepang-Barat di tengah persaingan geopolitik di Asia.

5. Simpulan

Berdasarkan analisis tiga dimensi Norman Fairclough terhadap pidato Konsul Jenderal Jepang di Medan, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin utama:

1. Metafora Budaya sebagai Jembatan Ideologi

Penggunaan metafora “*Tate-ito*” (Benang Lusi) dan “*Yoko-ito*” (Benang Pakan) yang dianalogikan dengan kain Ulos merupakan strategi lokalisasi (*glocalization*) yang sangat efektif. Jepang berhasil membingkai nilai-nilai politik liberal (demokrasi dan hukum) sebagai “pondasi” yang seolah-olah bersifat universal dan alami dalam hubungan dengan masyarakat Sumatera Utara.

2. Empati sebagai Legitimasi Moral

Keputusan untuk menempatkan ucapan duka cita di awal pidato bukan sekadar formalitas, melainkan cara menyentuh sisi emosional (*Pathos*) audiens agar lebih terbuka. Dengan menunjukkan empati terhadap bencana lokal, Jepang berhasil mengubah citranya: dari sekadar mitra bisnis menjadi “sahabat sejati” atau *Kokoro no Tomo*. Kedekatan emosional inilah yang akhirnya membuka jalan bagi Jepang untuk masuk ke agenda-agenda strategis dengan cara yang lebih terhormat dan diterima.

3. Sinkronisasi Narasi Global dan Lokal

Secara narasi, pidato ini memperlihatkan keselarasan yang apik antara kebijakan besar di Tokyo dengan langkah nyata di Medan. Di sini, Konsul Jenderal Furugori Toru tidak sekadar tampil sebagai birokrat yang kaku. Ia berperan sebagai komunikator budaya yang andal, yang mampu mengemas kepentingan nasional Jepang, seperti investasi dan pengaruh wilayah, ke dalam bahasa yang sangat menghargai kearifan lokal setempat.

4. Kontribusi pada Diplomasi *Soft Power*

Secara keseluruhan, pidato ini adalah bukti nyata bagaimana Jepang memainkan soft power-nya dengan sangat halus. Dengan merangkul simbol lokal seperti ulos dan kuliner tradisional, narasi yang muncul bukan lagi soal hubungan kekuasaan yang timpang, melainkan sebuah 'ilusi kesetaraan' yang akrab. Ini membuktikan bahwa diplomasi modern bukan sekadar angka investasi, melainkan kemahiran menenun cerita yang mampu menyentuh sisi emosional dan budaya masyarakat di Sumatera Utara.

6. Daftar Pustaka

- Azmah, S. F. N., Ansorayah, S., & Mayumi, I. (2023). Analisis wacana kritis Fairclough dalam wacana Pilpres 2024 (Studi kasus berita di Instagram @Pinterpolitik). *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi dan Kesehatan (J-P3K)*, 4(2), hlm.45–53.
- Dewi, N. M. A. A., & Wedayanti, N. P. L. (2025). Strategi bernegosiasi bisnis berbasis konsep budaya Jepang: Kajian sosiopragmatik. *Sakura*, 7(2), hlm. 357–376. <http://doi.org/10.24843/JS.2025.v07.i02.p11>
- Fairclough, N. (1989). *Language and power*. Longman.
- Fairclough, N. (1992). *Discourse and social change*. Polity Press.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Fairclough, N. (2001). *Language and power* (2nd ed.). Pearson Education.
- Fairclough, N. (2003). *Analyzing discourse: Textual analysis for social research*. Routledge.
- Jorgensen, M. W., & Phillips, L. J. (2002). *Discourse analysis as a theory and method*. Sage Publications.
- Konsulat Jenderal Jepang di Medan. (2026a, 12 Februari). 天皇誕生日祝賀レセプション 古領事公邸料理人による挨拶 (*Tennō tanjōbi shukuga resepushon Furugori*

ryōji kōtei ryōrinin ni yoru aisatsu). https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00489.html

Konsulat Jenderal Jepang di Medan. (2026b, 12 Februari). *Kata sambutan Konjen Furugori pada resepsi HUT Sri Baginda Kaisar Jepang Naruhito*. https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itpr_id/11_000001_00490.html

Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). *Metaphors we live by*. The University of Chicago Press.

Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. PublicAffairs.

Rohmadiati, I., Kasanusi, Triristina, N., Akbar, B. W. P., & Iskandar, W. N. R. (2025). Strategi Japan Foundation dalam diplomasi budaya Jepang di Indonesia melalui program Nihongo Partners (2022-2024). *Journal of Public Power*, 9(2), hlm. 1–17.

Tahlia, A. I., & Abrian, R. (2023). Musik sebagai kritik sosial terhadap pemerintah: Kajian analisis wacana Norman Fairclough (Lagu Kritik Lagi – Feast). *An-Nas: Jurnal Humaniora*, 7(2), hlm. 178-190.

Wedayanti, N. P. L., Dewi, N. M. A. A., & Lestari, N. P. C. (2026). Dinamika multikulturalisme dan multilingualisme dalam masyarakat Jepang. *Sakura*, 8(1), hlm.540–549.

Wodak, R., & Meyer, M. (Eds.). (2015). *Methods of critical discourse analysis* (3rd ed.). Sage Publications.